

**EVALUASI IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTANSI INSTANSI (SAI)
PADA POLITEKNIK UNIVERSITAS ANDALAS PADANG**

TUGAS AKHIR

*Diajukan sebagai salah satu syarat
untuk memperoleh gelar Sarjana Sains Terapan
pada Jurusan Akuntansi
Program Studi Akuntansi Pemerintahan*

OLEH :

**ROSNITA
06096008**



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI PEMERINTAHAN
JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2009**



No. Alumni Universitas	Rosnita	No. Alumni Politeknik
a). Tempat/Tgl. Lahir: Padang, 05/05/1966		b). Nama Orang Tua : Basir c. Juanis
c). Jurusan : Akuntansi		d). Program Studi : Akuntansi Pemerintah
e). NBP : 06096008		f). Tgl. Lulus : 23 juli 2009
g). Predikat Lulus: San Memuaskan		h). IPK : 3.38
i). Lama Studi : 32 Bulan		j). Alamat Orang Tua : Jl. Rindang Alam No. 15 Kel. Koto Luar Kec. Padang Sumatera Barat

Evaluasi Implementasi Sistem Akuntansi Instansi
Tugas Akhir D4 oleh Rosnita, Pembimbing Wiwik Andriani, SE, Ak., 2. Armel Yentifa, SE, Ak.


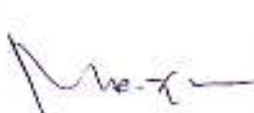


ABSTRAK

Dalam memenuhi tuntutan masyarakat terhadap terciptanya *good governance*, pemerintah terus berupaya untuk bersikap lebih transparan dalam pertanggungjawabannya kepada publik. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dalam bidang pengelolaan keuangan negara, yaitu dengan merancang suatu Sistem Akuntansi yang diterapkan baik ditingkat pusat yang dikenal dengan Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (SAPP) maupun ditingkat Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen yang dikenal dengan Sistem Akuntansi Instansi (SAI). Sistem ini diimplementasikan dengan tujuan untuk menghasilkan laporan keuangan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran dan penatausahaan Barang Milik Negara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kesesuaian penerapan SAI pada Politeknik Negeri Padang dengan Undang-undang maupun dengan standar penilaian yang dibuat oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Berdasarkan hasil penelitian ini diperoleh bahwa implementasi SAI pada Politeknik Negeri Padang sudah baik sedangkan untuk SIMAK - B masih kurang sehingga perlu penyempurnaan untuk mendapatkan hasil yang lebih baik.

Tugas Akhir telah dipertahankan di depan sidang penguji dan dinyatakan lulus pada tanggal : 23 Juli

Abstrak telah disetujui oleh penguji :

Penguji :

Tanda Tangan	1 	2 	3 	4 
Nama Terang	Nurul Fauzi, SE, MM, Ak	Anda Dwiharyadi, SE, Ak	Afridian Wirahadi A, SE, Ak	Wiwik Andriani, SE, Ak

Mengetahui :
Ketua Jurusan

Nurul Fauzi, SE, MM, Ak.
Nama


Tanda Tangan

Alumni telah mendaftar ke Fakultas/Politeknik Negeri Padang dan mendapat Nomor Alumni :

	Petugas Fakultas/Politeknik Negeri Padang	
Nomor Alumni Fakultas :	Nama	Tanda Tangan
Nomor Alumni Universitas	Nama	Tanda Tangan

BAB SATU

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Tuntutan terhadap terciptanya *good governance* sudah menjadi kehendak sebagian besar masyarakat. Untuk menjawab tuntutan itu, pemerintah terus berupaya untuk bersikap lebih transparan dalam pertanggungjawaban publiknya. Hal ini sesuai dengan yang disyaratkan oleh IMF dalam "*Code of Good Practices on Fiscal Transparency*" (IMF, 2001).

Salah satu upaya peningkatan transparansi pertanggungjawaban kepada publik adalah di bidang pengelolaan anggaran. Saat ini format Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) telah berubah dari format anggaran berimbang dan dinamis menjadi format anggaran defisit (Dewi, 2001), sehingga dapat memperlihatkan sumber pembiayaan pemerintah untuk menutup defisit tersebut, atau dengan kata lain dapat memperlihatkan hutang negara.

Upaya untuk mewujudkan akuntabilitas keuangan negara yang lebih baik, sebenarnya telah dirintis oleh Badan Akuntansi Keuangan Negara (BAKUN) sejak tahun 1982, yaitu dengan melakukan modernisasi terhadap akuntansi pemerintah yang selama ini berjalan, dengan suatu sistem akuntansi pemerintah baru yang disebut Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (SAPP). Kegiatan ini dilakukan melalui Proyek Penyempurnaan Sistem Akuntansi dan Pengembangan Akuntansi (PPSAPA) dengan bantuan pembiayaan dari Bank Dunia (*World Bank*). (Bastian, 2006).

Kemudian Dewi (2001) juga menyatakan dengan sistem baru ini pemerintah dapat menyusun neraca, sehingga masyarakat dapat melihat bagaimana perubahan

asset, hutang dan ekuitas negara. Bila neraca untuk pemerintah pusat telah dapat disusun, maka langkah selanjutnya adalah mewujudkan penyusunan neraca konsolidasi, yang meliputi seluruh wilayah Indonesia. Neraca ini tentu akan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas seperti yang diharapkan selama ini.

Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (SAPP) yang dibuat oleh BAKUN terdiri dari dua sistem utama yang terpadu, yaitu Sistem Akuntansi Pusat (SAP) yang diselenggarakan oleh BAKUN sendiri dan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yang diselenggarakan oleh Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen. Sistem Akuntansi Instansi yang merupakan bagian dari SAPP yang mengolah transaksi-transaksi keuangan melalui APBN, terdiri dari beberapa sub sistem yang disesuaikan dengan struktur organisasi Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen pada umumnya, yaitu Sistem Akuntansi Tingkat Kementerian Negara/Lembaga, Sistem Akuntansi Tingkat Eselon I, Sistem Akuntansi Tingkat Wilayah, dan Sistem Akuntansi Tingkat Satuan Kerja.

Sistem Akuntansi Instansi yang telah dirancang oleh BAKUN diimplementasikan dengan tujuan untuk menghasilkan laporan keuangan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran dan laporan Barang Milik Negara (BMN) sebagai pertanggungjawaban penatausahaan BMN.

Sistem Akuntansi Instansi berlaku untuk seluruh unit organisasi Pemerintah Pusat, termasuk Perguruan Tinggi Negeri dan Kopertis yang berada di bawah pengawasan Departemen Pendidikan Tinggi (DIKTI) dan unit akuntansi pada Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan Dekonsentrasi dan/atau Tugas Pembantuan serta pelaksanaan Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan.

Sistem Akuntansi Instansi dilaksanakan oleh Kementerian Negara/lembaga dengan memproses transaksi keuangan yang meliputi arus uang maupun barang. SAI

tersebut terdiri dari Sistem Akuntansi Pertanggungjawaban Anggaran dan Sistem Akuntansi Pertanggungjawaban Barang Milik Negara.

Pada tahun 2004, telah dibentuk Komite Standar Akuntansi Pemerintahan yang disahkan dengan Keputusan Presiden RI Nomor 84 Tahun 2004 dan telah diubah dengan Keputusan Presiden RI Nomor 2 tahun 2005. Komite ini telah menghasilkan Standar Akuntansi Pemerintahan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005, sebagai acuan dalam sistem pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang transparan dan akuntabel yang berlaku secara nasional.

Mengingat pentingnya Sistem Akuntansi bagi instansi pemerintah termasuk Perguruan Tinggi dalam upaya mewujudkan *good governance*, maka penulis memilih Politeknik Negeri Padang sebagai salah satu unit organisasi yang berada dibawah pengawasan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dan telah mengelola anggaran keuangan sendiri, baik dana yang berasal dari APBN maupun dana dari Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) termasuk dana-dana yang diperoleh dari hibah, yang memiliki kewajiban untuk mengimplementasikan Sistem Akuntansi Instansi.

Penerapan Sistem Akuntansi Instansi masih baru di Politeknik Negeri Padang, yaitu sejak tahun 2005. Karena masih baru, maka dalam pelaksanaannya mungkin belum sempurna. Untuk itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **Evaluasi Implementasi Sistem Akuntansi Instansi (SAI) pada Politeknik Universitas Andalas Padang.**

BAB LIMA

PENUTUP

5.1. KESIMPULAN

Berdasarkan evaluasi yang dilakukan terhadap implementasi Sistem Akuntansi Instansi (SAI) pada Politeknik Negeri Padang dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan implementasi SAI yang meliputi SAK dan SIMAK-BMN sudah **Baik**. Hal ini dibuktikan dengan hasil evaluasi 2.9 (**Baik**). Hasil ini didapatkan dari rata-rata penilaian yang dilakukan terhadap implementasi SAK, implementasi SIMAK-BMN serta pemahaman dan kesesuaian laporan keuangan dengan SAP dengan rincian sebagai berikut :

1. Implementasi SAK mendapat nilai 3 (**Baik**)
2. Implementasi SIMAK-BMN mendapat nilai 2.7 (**Baik**)
3. Pemahaman dan kesesuaian laporan keuangan dengan SAP mendapat nilai 2.9 (**Baik**)

Dari ketiga elemen penilaian di atas yang paling terendah adalah implementasi SIMAK-BMN yang meliputi aspek sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta implementasi SIMAK-BMN UAKPB. Dengan kondisi seperti ini, implementasi SIMAK-BMN perlu mendapat perhatian yang lebih serius dan dalam proses implementasi SAI di masa yang akan datang elemen lainnya juga masih perlu perbaikan.

Walaupun implementasi SAI pada Politeknik Negeri Padang telah baik, ternyata tidak terlepas dari kendala-kendala dan keterbatasan yang dihadapi, diantaranya adalah ketiadaan pemisahan fungsi data entry dan fungsi verifikasi pada implementasi SIMAK-BMN, keterbatasan aplikasi SIMAK-BMN sehingga tidak

dapat menampung seluruh jenis transaksi BMN yang terjadi, keterbatasan modul dan manual aplikasi SIMAK-BMN, keterbatasan anggaran operasional SIMAK-BMN, keterlambatan petugas akuntansi SIMAK-BMN menerima dokumen sumber.

Kendala-kendala yang dihadapi tersebut tidak sepenuhnya bersumber dari pihak Politeknik Negeri Padang. SAI sendiri masih baru diimplementasikan dilingkungan instansi pemerintah sehingga aplikasi baik SAK maupun SIMAK-BMN masih dalam tahap penyempurnaan dan butuh waktu agar tujuan yang diharapkan dapat tercapai semaksimal mungkin.

5.2. SARAN

Dengan memperhatikan Implementasi Sistem Akuntansi Instansi pada Politeknik Negeri Padang, ada beberapa hal yang dapat penulis sarankan agar implemetansi SAI tahun berikutnya dapat lebih baik sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku :

1. Penugasan personil yang menunjukkan adanya pemisahan fungsi data entry dengan fungsi verifikasi khusus untuk SIMAK-BMN.
2. Penambahan anggaran operasional yang memadai untuk mendukung implementasi SIMAK-BMN pada Politeknik Negeri Padang.
3. Penambahan personil untuk mendukung implementasi SIMAK-BMN pada Politeknik Negeri Padang.
4. Pengaturan jadwal penyerahan dokumen sumber transaksi BMN yang jelas kepada petugas akuntansi SIMAK-BMN.
5. Melakukan verifikasi terhadap Daftar Transaksi BMN secara berkala untuk memastikan bahwa seluruh transaksi BMN telah dientry dalam aplikasi SIMAK-BMN secara lengkap dan benar.

DAFTAR PUSTAKA

- Bastian, Indra. (2006). *Sistem Akuntansi Sektor Publik Modul untuk Pelatihan Penyusunan Laporan Keuangan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Biro Keuangan Sekretariat Jenderal Departemen Pendidikan Nasional. (2009). *Sistem Akuntansi Instansi*. Indonesia ; Kemitraan Australia Indonesia.
- Dewi, Y. (2001). *Prospek dan Kendala Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah*.
- Forum Dosen Akuntansi Sektor Publik. (2006). *Standar Akuntansi Pemerintahan Telaah Kritis PP Nomor 24 Tahun 2005*. Edisi Pertama, Yogyakarta: BPF.
-(2001). *Code of Good Practices on Fiscal Transparency*. IMF.
- Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- Keputusan Menteri Keuangan Nomor. 91/PMK.06/2007 tentang Bagan Akun Standar.
-(2007). Nomor. 96/PMK.06/2007, tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahtanganan BMN.
-(2007). Nomor. 97/PMK.06/2007, tentang Penggolongan dan Kodifikasi BMN.
-(2007). Nomor. 171/PMK.05/2007, tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah.
- Komite Standar Akuntansi Pemerintah. (2005). *Standar Akuntansi Pemerintah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2003). *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara*, Jakarta.
- _____ (2004). *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara*.
- _____ (2004). *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005, *Standar Akuntansi Pemerintahan*, Fokusmedia, Bandung.